

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh semua negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan juga kemampuannya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk secara umum. Pembangunan yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kesenjangan, serta memperbaiki taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2021).

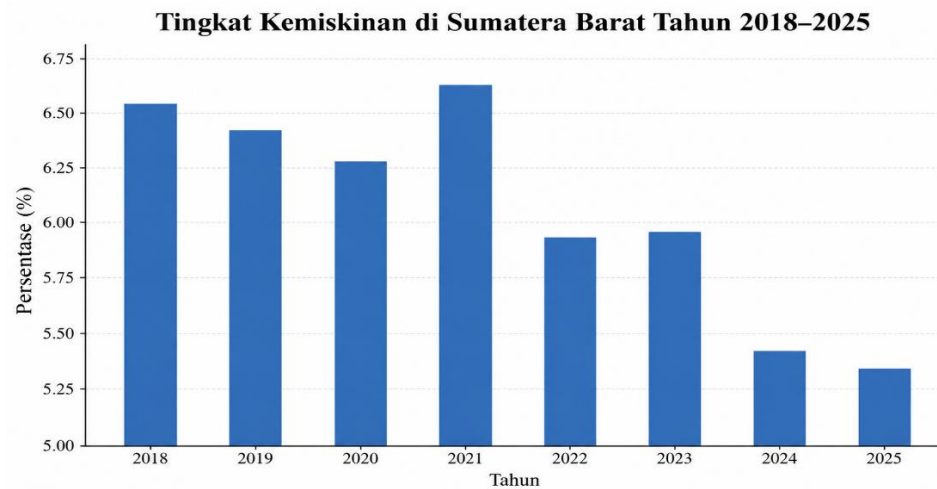
Mutu sumber daya manusia memegang peranan sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketersediaan SDM yang terpelajar, berfisik prima, serta produktif mampu memperkuat daya saing daerah hingga skala nasional. Sebaliknya, SDM yang minim kualitas dapat menjadi penghambat akibat merosotnya produktivitas kerja dan tertutupnya peluang masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak. Maka dari itu, penguatan SDM menjadi fondasi mutlak untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan (Becker, 1964; UNDP, 2024).

Meskipun berbagai indikator di Indonesia menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, masih terdapat tantangan yang dapat menghambat peningkatan kualitas hidup penduduk. Salah satu masalah tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan menggambarkan situasi ketika individu atau sebuah keluarga mengalami keterbatasan kemampuan finansial dalam mencukupi kebutuhan esensial, baik konsumsi pangan maupun non-pangan, yang mengakibatkan belum terwujudnya standar hidup minim yang layak. Fenomena kemiskinan tidak sekadar tecermin dari minimnya perolehan upah atau penghasilan masyarakat, melainkan menyangkut pula sempitnya jangkauan terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja yang memadai, hingga sarana publik lainnya. Maka dari itu, strategi pengentasan kemiskinan diposisikan sebagai pilar krusial dalam agenda pembangunan nasional, mengingat keberhasilannya berpengaruh langsung terhadap perbaikan mutu kehidupan dan kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Sumatera Barat terus berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai kebijakan pembangunan serta pelaksanaan program perlindungan sosial. Perkembangan tingkat kemiskinan di provinsi ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, tingkat inflasi, serta

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2025), diolah

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2025

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2025 menunjukkan kecenderungan menurun meskipun sempat mengalami fluktuasi. Persentase penduduk miskin menurun dari 6,55 persen pada tahun 2018 menjadi 6,28 persen pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 6,63 persen pada tahun 2021 sebagai dampak perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Setelah itu, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga mencapai 5,35 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat seiring dengan proses pemulihan ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,

sehingga berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan.

Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan menurun, masih terdapat rumah tangga yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi hak-hak dasar anak, seperti memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Dalam situasi tertentu, keterbatasan ekonomi dapat mendorong anak untuk ikut melakukan kegiatan ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pekerja anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (ILO, 2021; BPS, 2024).

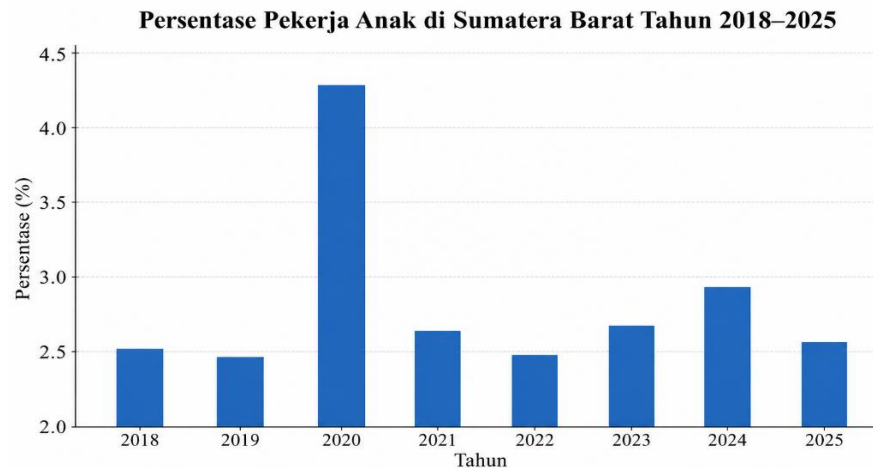
Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja anak (*child labour*) merupakan pekerjaan yang mengganggu pendidikan anak, membahayakan kesehatan dan keselamatannya, serta menghambat perkembangan fisik, mental, sosial, maupun moral anak (ILO, 2021). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pekerja anak sebagai penduduk usia 10–17 tahun yang bekerja dan memenuhi kriteria tertentu sesuai konsep statistik ketenagakerjaan yang digunakan dalam pengumpulan data nasional (BPS, 2024). Keterlibatan anak dalam pekerjaan pada usia dini berpotensi mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai modal pembangunan di masa depan.

Isu pekerja anak masih menjadi salah satu tantangan krusial dalam ranah ketenagakerjaan dan perlindungan anak di tingkat global. Laporan gabungan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF mencatat keberadaan sekitar 160 juta anak di dunia yang terjerat dalam aktivitas pekerja anak pada tahun 2020. Proporsi tersebut mencerminkan estimasi bahwa satu dari sepuluh anak secara global masih harus bekerja, di mana mayoritas di antaranya terserap pada bidang pertanian, diikuti oleh sektor jasa serta manufaktur. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi penanganan berskala global yang berfokus pada perluasan jangkauan pendidikan, penguatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan ekonomi keluarga (ILO & UNICEF, 2021).

Fenomena pekerja anak di Indonesia tetap menjadi fokus perhatian, sekalipun pemerintah telah memicu berbagai program guna memperkuat kesejahteraan warga dan membuka keterjangkauan akses pendidikan. Keberadaan pekerja anak yang masih tersebar di berbagai wilayah dengan keragaman latar belakang sosial-ekonomi menegaskan perlunya komitmen jangka panjang demi menjamin hak-hak esensial anak, seperti pendidikan, perlindungan hukum, serta tumbuh kembang yang ideal (BPS, 2024; Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Permasalahan serupa turut dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Kendati tren tingkat kemiskinan kawasan ini mencatatkan penurunan selama beberapa tahun terakhir, keterlibatan penduduk usia 10–17 tahun dalam roda perekonomian masih terus ditemukan. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa isu pekerja anak memerlukan

penanganan yang terukur dan berkelanjutan, mengingat korelasinya yang erat dengan akselerasi mutu sumber daya manusia serta masa depan pembangunan daerah.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2025), diolah

Gambar 1. 2 Persentase Pekerja Anak Usia 10–17 Tahun di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2025

Gambaran pada Gambar 1.2 memperlihatkan dinamika persentase pekerja anak kelompok umur 10–17 tahun di Provinsi Sumatera Barat sepanjang kurun waktu 2018–2025 yang bergerak secara fluktuatif. Tingkat partisipasi pekerja anak pada tahun 2018 berada di angka 2,51 persen, lalu tereskalasi melandai ke tingkat 2,46 persen pada 2019. Memasuki tahun 2020, lonjakan drastis terjadi hingga menyentuh angka 4,29 persen. Lonjakan signifikan ini disinyalir sebagai efek domino dari maraknya pandemi Covid-19 yang memicu kelesuan iklim ekonomi, pemangkasan penghasilan keluarga, serta memperberat beban finansial masyarakat. Seiring pemulihan kondisi ekonomi pascapandemi, proporsi pekerja anak berangsur turun menjadi 2,64 persen pada 2021

dan 2,48 persen pada 2022. Kendati demikian, tren ini kembali merambat naik pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 2,68 persen dan 2,93 persen, sebelum akhirnya terkoreksi turun ke level 2,56 persen pada 2025. Pergerakan data ini menegaskan bahwa tingkat keberadaan pekerja anak di Sumatera Barat belum membentuk pola penurunan yang konsisten dan masih diwarnai ketidakpastian (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025).

Dinamika pasang surut data tersebut mengindikasikan bahwa fenomena pekerja anak tetap menjadi tantangan nyata bagi penguatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat. Sekalipun rangkaian agenda intervensi sosial dan pemerataan jalur pendidikan telah digulirkan oleh pemerintah, partisipasi anak dalam ranah pekerjaan terus terdeteksi tiap tahunnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa keterlibatan anak dalam pasar kerja dipicu oleh jalinan faktor yang kompleks, mencakup karakteristik internal rumah tangga hingga kondisi lingkungan sekitar. Maka dari itu, riset mendalam untuk membedah akar determinan probabilitas anak menjadi pekerja anak sangat mendesak dilakukan demi menyokong perumusan strategi intervensi yang presisi dalam menekan angka pekerja anak di kawasan ini (ILO & UNICEF, 2021; BPS, 2025).

Menggunakan data Susenas 2021, riset Suryaningrum dan Maulana (2025) mengungkapkan bahwa atribut rumah tangga—terutamanya keterlibatan orang tua pada sektor informal serta himpitan kemiskinan—mendorong peningkatan risiko anak untuk bekerja, baik secara penuh maupun merangkap sekolah. Temuan ini menegaskan

bahwa alokasi keputusan anak masuk ke pasar kerja berakar kuat pada profil sosial-ekonomi keluarga.

Selain kondisi pekerjaan dan ekonomi rumah tangga, pendidikan orang tua juga banyak dikaji dalam penelitian mengenai pekerja anak Penelitian Susilo et al. (2024) membuktikan bahwa tingkat pendidikan orang tua menentukan pola partisipasi sekolah dan potensi anak memasuki dunia kerja di Indonesia. Semakin tinggi jenjang pendidikan orang tua, semakin kuat kecenderungan anak untuk fokus mengenyam pendidikan formal serta makin kecil kecenderungan mereka untuk bekerja.

Temuan ini memperkuat *Human Capital Theory* dari Becker (1964) yang menekankan pendidikan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan kualifikasi SDM. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan wawasan yang memadai untuk penentuan keputusan yang presisi. Di tingkat keluarga, orang tua terpelajar umumnya lebih melek akan signifikansi pendidikan, sehingga cenderung menjaga keberlanjutan sekolah anak dibanding mendorong mereka bekerja di usia dini.

Selain karakteristik orang tua, berbagai kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan keberlangsungan pendidikan anak melalui pemberian bantuan pendidikan. Salah satu program yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin guna membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan sehingga anak dapat terus mengakses layanan pendidikan hingga menyelesaikan jenjang pendidikannya. Program tersebut

merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus mencegah peserta didik putus sekolah.

Hubungan antara bantuan sosial dan pekerja anak telah banyak dikaji dalam penelitian empiris. Salah satunya adalah penelitian Candrawati dan Auwalin (2024) yang menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pekerja anak di Indonesia menggunakan data Susenas tahun 2019–2021. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, PKH belum mampu menurunkan pekerja anak secara signifikan. Penulis menjelaskan bahwa guncangan ekonomi yang dialami rumah tangga menyebabkan bantuan tunai saja belum cukup untuk mengurangi keterlibatan anak dalam pekerjaan sehingga diperlukan strategi perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1964). Menurut teori ini, pendidikan merupakan investasi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar, diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya pendidikan yang dihadapi rumah tangga sehingga kesempatan anak untuk tetap bersekolah menjadi lebih besar. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar dipilih sebagai salah satu variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Kondisi ekonomi rumah tangga merupakan salah satu aspek yang banyak dikaji dalam penelitian mengenai pekerja anak. Penelitian Wahyuni dan Arisetyawan (2026) yang menganalisis data 34 provinsi di Indonesia periode 2019–2023 menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga berhubungan secara signifikan dengan persentase pekerja anak di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga masih menjadi faktor penting dalam menjelaskan variasi pekerja anak antarwilayah, sehingga peningkatan kesejahteraan rumah tangga menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk menekan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Ali dan Arabsheibani (2023) yang menggunakan data anak usia 10–17 tahun di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga, semakin kecil peluang anak untuk bekerja. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pendidikan kepala rumah tangga yang lebih tinggi berkaitan dengan menurunnya kemungkinan anak menjadi pekerja, sedangkan anak yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang lebih besar untuk bekerja dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Penelitian ini sekaligus memberikan bukti empiris mengenai keberadaan Luxury Axiom dalam konteks Indonesia.

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan Luxury Axiom yang dikemukakan oleh Basu dan Van (1998). Teori ini menjelaskan bahwa rumah tangga pada umumnya tidak akan melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi apabila tingkat kesejahteraannya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi

rumah tangga masih terbatas, anak berpotensi ikut bekerja sebagai salah satu strategi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam penelitian ini, tingkat kesejahteraan rumah tangga diproksikan menggunakan pengeluaran rumah tangga, karena indikator tersebut dinilai lebih mampu mencerminkan kemampuan konsumsi rumah tangga dibandingkan pendapatan yang cenderung berfluktuasi. Oleh karena itu, pengeluaran rumah tangga dipilih sebagai salah satu variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Selain aspek perorangan dan rumah tangga, kondisi geografi pemukiman merupakan dimensi penting yang acap kali diuji dalam studi pekerja anak. Pembuktian empiris Ali dan Arabsheibani (2016) di Indonesia menunjukkan bahwa kecenderungan anak untuk menjadi pekerja jauh lebih besar di wilayah perdesaan ketimbang perkotaan. Hal ini dipicu oleh kontrasnya karakter ekonomi antar-daerah, di mana sektor pertanian yang dominan di perdesaan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi keterlibatan anak pada usaha keluarga. Studi ini menyimpulkan bahwa interaksi antara karakteristik keluarga dan kondisi lingkungan pemukiman menjadi determinan yang tidak terpisahkan dalam menjelaskan fenomena pekerja anak.

Temuan tersebut didukung oleh International Labour Organization (ILO) yang melaporkan bahwa sebagian besar pekerja anak di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, terutama pada sektor pertanian, sementara prevalensinya relatif lebih rendah di wilayah perkotaan. ILO menjelaskan bahwa perbedaan struktur ekonomi, kesempatan kerja keluarga, serta akses terhadap pendidikan dan layanan

publik menjadi beberapa kondisi yang membedakan karakteristik pekerja anak antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal masih menjadi aspek yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai pekerja anak. Dalam penelitian ini, wilayah tempat tinggal dibedakan menjadi wilayah perkotaan dan perdesaan sebagaimana klasifikasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Penggunaan variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apakah terdapat perbedaan kecenderungan probabilitas anak menjadi pekerja anak berdasarkan karakteristik wilayah tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Sekalipun riset seputar pekerja anak telah berkembang pesat, temuan dari berbagai studi terdahulu masih memperlihatkan inkonsistensi. Hasil kajian Suryaningrum dan Maulana (2025) membuktikan peranan kondisi ekonomi dan jenis pekerjaan orang tua terhadap naiknya peluang anak bekerja di Indonesia. Di lain pihak, investigasi Candrawati dan Auwalin (2024) menunjukkan bahwa intervensi jaring pengaman sosial melalui Program Keluarga Harapan belum berdampak nyata dalam mereduksi pekerja anak selama krisis pandemi Covid-19. Adapun riset Ali dan Arabsheibani (2016) menekankan bahwa kombinasi antara atribut wilayah dan karakteristik internal rumah tangga menjadi penentu utama pilihan anak masuk ke dunia kerja. Disparitas hasil tersebut mengisyaratkan bahwa fenomena pekerja anak senantiasa bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga eksplorasi empiris pada lokus serta periode terbaru masih sangat dibutuhkan.

Selain perbedaan hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan data sebelum tahun 2025 atau memiliki cakupan wilayah nasional maupun lintas provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian belum tentu dapat menggambarkan karakteristik pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi terkini. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan penelitian yang menggunakan data terbaru agar mampu memberikan gambaran empiris yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis keterkaitan tingkat pendidikan orang tua, kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP), pengeluaran rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2025. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan penggunaan data Susenas 2025 diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai karakteristik pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran rumah tangga terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran rumah tangga terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.
4. Menganalisis pengaruh wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai hubungan antara tingkat pendidikan orang tua, kepesertaan Program

Indonesia Pintar (PIP), pengeluaran rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal dengan probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2025. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik pekerja anak dengan menggunakan variabel, wilayah penelitian, maupun metode analisis yang berbeda sehingga dapat memperkaya hasil penelitian di bidang ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dalam menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan pekerja anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakteristik rumah tangga yang berkaitan dengan probabilitas anak menjadi pekerja anak sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga rentan, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang lebih tepat sasaran di Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis dalam penelitian ini adalah anak usia 10–17 tahun sesuai dengan konsep pekerja anak yang digunakan oleh BPS. Variabel dependen yang digunakan adalah probabilitas anak menjadi pekerja anak, sedangkan variabel independennya terdiri atas tingkat pendidikan orang tua, kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP), pengeluaran rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi Probit untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dengan probabilitas anak menjadi pekerja anak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat serta alasan pentingnya penelitian dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Melalui bab ini, pembaca memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai, serta arah penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian, seperti teori Human Capital dan Luxury Axiom, serta teori-teori lain yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, bab ini menyajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian, menyusun kerangka pemikiran, serta merumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan unit analisis, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data. Pada bab ini juga dijelaskan model regresi Probit yang digunakan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan orang tua, kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP), pengeluaran rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data serta analisis yang diperoleh dari estimasi model Probit. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap probabilitas anak menjadi pekerja anak, kemudian membandingkannya dengan landasan teori dan hasil penelitian

terdahulu. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan mengenai implikasi hasil penelitian terhadap kondisi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga mengemukakan keterbatasan penelitian yang dihadapi selama proses penelitian serta memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, instansi terkait, maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai pekerja anak.

